

**AKUNTANSI ASET TETAP
DI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :
MIKE ANDRIANI
2010-57966

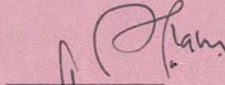


**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIII
PROGRAM DIII FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR**AKUNTANSI ASET TETAP
DI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG**

Nama : Mike Andriani
Nim : 2010/57966
Program Studi : Akuntansi (D III)
Fakultas : Ekonomi

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

**Padang, Januari 2014
Tim Penguji**

Nama		Tanda Tangan
1. Elvi Rahmi, S.Pd, M.Pd	(Ketua)	
2. Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak. Ak	(Anggota)	
3. Halkadri Fitra, SE,MM,Ak	(Anggota)	

ABSTRAK

Andriani, Mike : AKUNTANSI ASET TETAP DI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG

Pembimbing : Elvi Rahmi, S.Pd, M.Pd.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Penulis melakukan penelitian ini karena Aset Tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Untuk mendukung pengelolaan barang milik daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki dan mengembangkan sistem informasi yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Metode observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap pegawai yang sedang bekerja, wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai pegawai yang menangani aset tetap milik daerah, dan analisis dokumen dengan cara menganalisis data yang berhubungan dengan akuntansi aset tetap di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang diterapkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang belum sesuai dengan PSAP 07 tentang Aset Tetap. Alasannya adalah Disosnaker Kota Padang belum pernah melakukan penyusutan karena belum adanya kebijakan akuntansi dari Pemerintah Kota Padang untuk melakukan penyusutan tersebut. Tetapi dalam perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang diterapkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tersebut hanya melakukan sistem penghapusan saja. Oleh karena itu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang khususnya bidang aset perlu meningkatkan pelatihan/diklat untuk menambah wawasan, kreatifitas dan kinerja pegawai sehingga tujuan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang akan mudah untuk dicapai.

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "Akuntansi Aset Tetap di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang". Tugas Akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNP.
2. Bapak Perengki Susanto, SE, M.Sc, selaku Ketua Pelaksana Program Studi dan Ibu Nelvirita, SE M.Ak, selaku anggota Pelaksana Program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Elvi Rahmi, S.Pd, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang dengan bijaksana dan penuh kesabaran memberikan pengarahan kepada penulis.
4. Bapak Dr.Idris, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan masukan selama perkuliahan.
5. Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak, Ak selaku penguji I yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis.
6. Bapak Halkadri Fitra, SE,MM,Ak, selaku penguji II yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis.

7. Bapak Hariadi Dahlan Bakri, SH, selaku Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang yang telah memberikan izin bagi penulis dalam mengumpulkan data.
8. Seluruh pegawai dan staff Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang yang telah memberikan sumbangan ilmu dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Teristimewa kepada Orang tua, Ayahanda Jusri dan Ibunda Yulinar yang telah mengorbankan begitu banyak hal untuk penulis yang tidak ternilai dan terbalas oleh penulis yang diberikan dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Semoga Allah SWT mencatatkan nama mereka sebagai penghuni syurgaAmiin.
10. Teristimewa juga kepada keluarga Mama yu, selaku orang tua angkat dan pemimpin tempat penulis bekerja dan Karyawan keripik 4x7 Bintang jaya yang telah banyak mengorbankan begitu banyak hal untuk penulis yang tak ternilai dan terbalas oleh penulis yang diberikan dengan penuh keikhlasan serta kasih sayang.
11. Kakanda: Nelva Yulita, Widia Yani. Adinda tercinta Deni Putri Ayu, Luri Karlina dan keponakan tersayang Raffa, Nesya, Vino, yang selalu mendoakan, memberikan dorongan, motivasi, dukungan moril dan materi kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Spesial untuk bg Ade yang selalu mendampingi penulis saat duka dan suka selama penulis menyusun Tugas Akhir sampai selesai.
13. Sahabat setia Orin, Fajri, Tyas, Sintia, Amel, Tika, Anggun, Lisa, Novi, kak Icha dan segenap keluarga besar DIII Akuntansi 2010 Genap serta semua sahabat seperjuangan yang selalu menemani dan memberikan motivasi serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Makasih banyak atas semua semangat dan kebersamaan selama ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan, baik penganalisisan dan pembahasan, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis. Untuk itu penulis berharap adanya masukan

ataupun saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca lainnya, terutama bagi penulis sendiri.

Padang, Januari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian dan Karakteristik Aset Tetap	8
B. Klasifikasi Aset Tetap.....	9
C. Pengakuan Aset Tetap.....	11
D. Penilaian Aset Tetap	13
E. Perlakuan Aset Tetap Setelah Perolehan.....	13
F. Penyusutan Aset Tetap.	14
G. Penghentian dan Penghapusan Aset Tetap	19
H. Pelaporan Atau Penyajian Aset Tetap.....	26
I. Pengungkapan Aset Tetap	27
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	28
A. Bentuk Penelitian.....	28
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	28
C. Rancangan Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Tahapan Penelitian.....	29
D. Metode Pengumpulan data.....	30
E. Objek Penelitian.....	30
F. Sumber Data	31
G. Teknik Analisis	31
BAB IV PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Umum Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.....	32
1. Sejarah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.....	32
2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	32
3. Arah Kebijakan Umum	36
4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.....	37
5. Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.....	37

B. Hasil Penelitian	39
C. Pembahasan.....	51
D. Kesimpulan	63
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

1. Surat Permohonan Observasi
2. Struktur Organisasi
3. Neraca Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Tahun 2012
4. Laporan Aset Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Tahun 2012
5. Daftar Mutasi Barang Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang
6. Buku Inventaris Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang
7. Daftar Usulan Penghapusan Barang Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aset tetap masih merupakan akun yang dikecualikan atau dianggap tidak wajar dalam opini laporan keuangan pemerintah daerah (pemda). Hal ini tidak terlepas dari banyaknya permasalahan aset tetap yang dihadapi pemda. Beberapa contoh permasalahan aset tetap yang sering dijumpai pada pemda antara lain 1) Pemda tidak melakukan kapitalisasi terhadap biaya-biaya yang sebenarnya menambah harga perolehan aset tetap.

Hal ini terkait kesalahan penganggaran seperti belanja yang seharusnya dianggarkan pada belanja modal tapi dianggarkan pada belanja barang dan jasa atau belanja pegawai. 2) penilaian aset tetap, pengungkapan nilai aset tetap tidak lengkap dan memadai, yaitu aset tetap tidak didukung rincian aset, pengklasifikasian aset tetap tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 3) Pengamanan aset tetap yang tidak memadai baik secara fisik maupun secara administrasi termasuk diantaranya masalah bukti kepemilikan. 4) Aset tetap pada sekolah-sekolah banyak yang belum tercatat. 5) Aset tetap dari pemerintah Pusat misalnya kantor wilayah yang diserahkan kepada pemerintah daerah tidak didukung rincian yang informatif dan tidak disertai bukti kepemilikan.

Dari semua contoh permasalahan aset di atas barangkali tidak semuanya berpengaruh terhadap opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), begitu juga dengan permasalahan lainnya yang terkait aset tetap. Permasalahan aset tetap dapat mempengaruhi opini apabila ada kondisi

terjadi pembatasan lingkup audit atau kecukupan bukti. Kondisi lainnya adalah terjadinya penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji. Kondisi-kondisi ini harus dikaitkan dengan tingkat materialitas akun aset tetap dan dampaknya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

Permasalahan aset menjadi permasalahan umum yang terus menjadi isu dalam setiap pemberian opini oleh BPK atas Pemeriksaan LKPD hingga saat ini tanpa perubahan yang cukup berarti. Tidak wajarnya aset tetap selain menjadi masalah atas akuntabilitas pengelolaan aset bagi Pemda juga akan menjadi beban bagi Pemeriksa BPK karena cakupan pemeriksaan yang terus meluas setiap tahunnya. Disini diharapkan peran Pemeriksa LKPD untuk dapat melakukan pengujian yang memadai dan menghasilkan rekomendasi BPK yang tepat agar masalah aset tetap dapat terselesaikan.

Laporan keuangan pemerintah Kota Padang tahun 2011 memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). Dalam laporan hasil pemeriksaan yang ditandatangani penanggungjawab pemeriksaan BPK RI perwakilan Sumbar Teguh Prasetyo bernomor 10.A/LHP/XVIII.PDG/06/2012 tanggal 19 Juni 2012, terdapat 18 temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Temuan-temuan itu antara lain, bendahara pengeluaran pada tujuh SKPD. Masing-masing, RSUD, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, DPKA, Dinas Pasar dan Kantor Kesbangpol dan Linmas, terlambat menyeter UYHD tahun 2011 sebesar Rp186,29 juta diantaranya sebesar Rp39,75 juta digunakan untuk kepentingan pribadi Kakan Kesbangpol dan Linmas.

Menurut Halim (2008:182) Aset tetap merupakan elemen utama dalam perusahaan yang berjumlah besar dan mengalami penyusutan dalam satu periode. Penentuan besarnya jumlah biaya penyusutan aset tetap ini merupakan masalah penting dalam perusahaan, karena besar kecilnya jumlah investasi yang tertanam didalam aset tetap mempengaruhi pada aktivitas perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pada keuntungan perusahaan. Mengingat pentingnya peranan aset tetap dalam mencapai tujuan perusahaan dan nilainya yang cukup materil maka sangat dibutuhkan suatu kebijakan terhadap aset tetap yang meliputi harga perolehan, metode penyusutan, pengelompokan biaya, pelepasan aset tetap serta penyajian dineraca.

Aset Tetap dalam PSAP 07 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aktivitas suatu instansi pemerintahan akan dapat berjalan dengan lancar apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, setiap instansi pemerintahan akan berusaha beraktivitas semaksimal mungkin dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.

Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (PSAP 07). Dimana PSAP 07 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan asset tetap berdasarkan peristiwa (events) yang

terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan aset dari hibah/donasi, dan penyusutan. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan aset tetap milik daerah agar aset tetap yang dimiliki dapat dikelola secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (PSAP 07).

Kemudian dalam paragraf 8 (delapan), aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap dibagi menjadi 6 (enam) klasifikasi yaitu: (a) tanah; (b) peralatan dan mesin; (c) gedung dan bangunan; (d) jalan, irigasi dan jaringan; (e) aset tetap lainnya; (f) konstruksi dalam pengerjaan.

Disosnaker Kota Padang, memakai beberapa aset tetap yang tidak digunakan secara efektif dan efisien, contohnya kendaraan. Yang mana kendaraan tersebut tidak digunakan atau tidak dioperasikan secara baik. Sehingga perlu dilakukan pemeliharaan dan perawatan sesuai dengan kondisi dan keadaan kendaraan di dinas tersebut. Pada saat aset tetap dimiliki maka perlakuan akuntansi terkait aset tetap tersebut adalah melakukan pemeliharaan, penyusutan dan revaluasi. Kemudian ketika aset tetap tersebut telah rusak berat maka akan dilakukan penghentian dan penghapusan.

Aset tetap yang digunakan secara terus menerus dalam operasional instansi pemerintahan semakin lama kemampuan aset tersebut akan berkurang dan mengalami penurunan nilai manfaat sejalan berlalunya waktu

atau disebut juga dengan istilah penyusutan, tetapi tidak demikian halnya dengan tanah, karena tanah mempunyai masa manfaat yang tidak terbatas dan tidak dapat disusutkan. Berkurangnya kemampuan aset tetap tersebut juga dapat disebabkan karena keterbelakangan teknologi, hal ini berarti berkurang pula nilai aset yang bersangkutan. Pengakuan adanya penurunan nilai manfaat terhadap aset tetap ini perlu dicatat dan dilaporkan dalam suatu penyusutan. Perlakuan akuntansi yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari pengguna aset tetap yang dimiliki dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan menyajikan aset tetap yang dimiliki secara wajar dalam laporan keuangan.

Menurut Bastian (2010:236) Pengeluaran yang terkait aset tetap (setelah perolehan aset) dapat diklasifikasikan sebagai “ 1) pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap, 2) pengeluaran yang bersifat memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat keekonomian dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.” Akuntansi berbasis akrual maupun akuntansi pemerintahan di Indonesia mempunyai perlakuan yang sama terhadap transaksi tersebut, untuk kategori yang pertama, perlakuan akuntansi adalah dengan membebankan semua pengeluaran yang terjadi sebagai belanja pemeliharaan, Alasannya adalah pengeluaran tersebut tidak menambah masa keekonomian terhadap aset yang bersangkutan. Pengeluaran tersebut hanya bersifat agar aset dalam kondisi baik dan dapat digunakan dalam proses operasional entitas. Sedangkan pengeluaran dalam kategori kedua, pengeluaran yang terjadi harus

dikapitalisasi(ditambah ke aset yang bersangkutan) sehingga nilai buku dari aset tersebut akan bertambah. Alasannya adalah pengeluaran yang dilakukan menambah masa manfaat atau masa keekonomian dari aset tersebut, sehingga biaya yang dikeluarkan seharusnya menjadi penambah nilai aset tetap yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul “Akuntansi Aset Tetap di Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis menetapkan perumusan masalah yaitu Bagaimana Perlakuan Akuntansi Aset Tetap di Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Perlakuan Akuntansi Aset Tetap di Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan dan pengaplikasian ilmu serta untuk mendapatkan gelar sebagai syarat kelulusan Diploma III.

2. Sebagai bahan pertimbangan atau referensi bagi berbagai pihak dan sebagai bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian berikutnya dan mengembangkan lebih lanjut.
3. Bagi pembaca dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pengetahuan serta tambahan informasi dalam melakukan sebagian tugas akhir pada objek yang sama.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan kepustakaan serta pembahasan yang telah penulis kemukakan pada Bab sebelumnya, yaitu tentang perlakuan akuntansi aset tetap di Disosnaker Kota Padang, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap di Disosnaker Kota Padang belum berjalan dengan semestinya, karena di dinas tersebut pemeliharaan aset tetapnya belum efektif . Hal ini menyebabkan ketidakefisiennya aset tetap di dinas tersebut. Maka dari itu perlu dilakukan pemeliharaan atau perawatan dengan baik sesuai dengan PSAP 07 agar aset tetap tersebut tetap terjaga seefektif mungkin.

B. Saran

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas kebijakan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap di Disosnaker Kota Padang maka penulis mencoba memberikan saran yang kiranya dapat membantu bagi Disosnaker Kota Padang dalam melakukan tugasnya lebih lanjut. Sebaiknya Disosnaker Kota Padang lebih meningkatkan lagi kualitas dalam pemeliharaan aset tetap sehingga aset tetap tersebut tetap terjaga dengan baik dan menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan sehingga pengeluaran biaya dapat diminimumkan sekecil mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga
- Firdaus. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta: Penerbit Nusantara.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan Telaah Kritis PP Nomor 24 tahun 2005*. Yogyakarta: BPFE.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat
- Halim,A & M.S Kusufi. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi: Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2010, *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09. Akuntansi Aset Tetap*, Jakarta
- Nazir, Moh. 2007. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah nomor 07, Akuntansi Aset tetap*
- Permendagri Nomor 17 tahun 2007 pasal 53, *penghapusan barang milik daerah*
- UNP. 2010. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Diploma III*. Padang.